



REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN
ANTARA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
REPUBLIK ISLAM IRAN
TENTANG
EKSTRADISI

Republik Indonesia dan Republik Islam Iran (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak");

Berkeinginan mengadakan kerja sama yang lebih efektif antara kedua negara dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan berdasarkan saling penghormatan terhadap kedaulatan, kesetaraan dan saling menguntungkan;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN EKSTRADISI

Setiap Pihak sepakat untuk melakukan ekstradisi kepada Pihak lainnya, sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan hukum domestiknya masing-masing, atas setiap orang yang ditemukan berada di wilayah Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak Peminta untuk penuntutan, persidangan, atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan sebelum atau setelah berlakunya Perjanjian ini.

PASAL 2

TINDAK PIDANA YANG DAPAT DIEKSTRADISIKAN

1. Suatu tindak pidana merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, apabila tindak pidana tersebut dapat dihukum menurut hukum kedua Pihak

dengan ancaman pidana penjara paling sedikit satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat.

2. Suatu tindak pidana merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, apabila tindak pidana tersebut meliputi suatu percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan, pembantuan atau penganjuran, pemberian nasihat atau pemberian kesempatan, atau penyertaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut pada Ayat 1 Pasal ini.
3. Menurut Pasal ini, dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum kedua Pihak, tidak menjadi persoalan apakah hukum kedua Pihak menempatkan perbuatan yang dituduhkan terhadap buronan tersebut dalam golongan tindak pidana yang sama atau menyebutkan tindak pidana tersebut dengan terminologi yang sama. Keseluruhan perbuatan yang dituduhkan akan dipertimbangkan terlepas dari adanya perbedaan unsur-unsur dasar tindak pidana yang dimintakan ekstradisinya.
4. Apabila permintaan ekstradisi meliputi sejumlah tindak pidana dan beberapa di antaranya tidak dapat dihukum dengan pidana penjara untuk jangka waktu paling sedikit satu tahun berdasarkan hukum kedua Pihak, ekstradisi dapat dikabulkan untuk semua tindak pidana apabila memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan termasuk pengabulan ekstradisi untuk sekurang-kurangnya satu tindak pidana yang dapat diekstradisikan.
5. Dalam hal ekstradisi dimintakan terhadap seseorang untuk suatu tindak pidana yang berkaitan dengan perpajakan, bea cukai, pengawasan valuta asing, atau masalah-masalah penghasilan lainnya, ekstradisi tidak dapat ditolak dengan alasan bahwa hukum Pihak Diminta tidak menerapkan jenis pajak atau bea yang sama atau tidak mengatur ketentuan-ketentuan pajak, bea cukai, atau pertukaran valuta asing yang serupa dengan hukum di Pihak Peminta.
6. Dengan tidak mengesampingkan Pasal 3 Ayat (4) Perjanjian ini, suatu tindak pidana dapat diekstradisikan berdasarkan Perjanjian ini, tanpa mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada orang yang diminta telah dilakukan secara keseluruhan atau sebagian di wilayah Pihak Diminta. Apabila berdasarkan hukum Pihak Diminta, perbuatan tersebut dan akibat yang ditimbulkannya, atau akibat yang dikehendakinya, secara

keseluruhan akan dianggap sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisikan di wilayah Pihak Peminta.

7. Apabila permintaan ekstradisi diajukan dengan tujuan untuk melaksanakan hukuman yang telah diputuskan, sisa masa hukuman yang harus dijalani untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan tersebut tidak kurang dari enam bulan.

PASAL 3

PENOLAKAN EKSTRADISI

1. Ekstradisi tidak dikabulkan apabila:
 - a. Tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana politik;
 - b. Pihak Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa permintaan ekstradisi diajukan dengan tujuan untuk menuntut atau menghukum orang yang diminta berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, suku, pandangan politik atau orang tersebut dapat, berdasarkan alasan-alasan dimaksud diperlakukan tidak adil dalam proses peradilannya;
 - c. Tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana militer, yang bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum;
 - d. Orang yang dimintakan ekstradisi tidak dapat dituntut karena daluwarsa berdasarkan hukum Pihak Peminta atau hukumannya tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengampunan;
 - e. Putusan yang berkekuatan hukum tetap telah dijatuhkan kepada orang yang diminta terkait dengan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi;
 - f. Tindak pidana yang dimintakan ekstradisi diancam dengan hukuman pidana mati berdasarkan hukum Pihak Peminta, sedangkan berdasarkan hukum Pihak Diminta, tindak pidana tersebut tidak diancam dengan hukuman pidana mati, kecuali Pihak Peminta menjamin bahwa apabila orang yang diminta tersebut dijatuhi pidana mati, pembedaannya tidak akan dilaksanakan.
2. Menurut Perjanjian ini, tindak pidana berikut tidak termasuk sebagai tindak pidana politik:
 - a. Tindak pidana terhadap nyawa atau diri Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan atau keluarga inti mereka;

- b. Tindak pidana berdasarkan konvensi internasional dalam hal Para Pihak memiliki kewajiban dengan menjadi Negara Pihak dalam konvensi tersebut, untuk melakukan ekstradisi atau melakukan penuntutan terhadap orang yang diminta atau menyerahkan kasus tersebut tanpa penundaan kepada Pihak Berwenang untuk tujuan penuntutan;
 - c. Tindak pidana terkait terorisme;
 - d. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan setiap tindak pidana sebagaimana tersebut di atas atau turut serta dalam pembantuan kepada seseorang yang melakukan atau mencoba untuk melakukan tindak pidana tersebut.
3. Tindak pidana serius terhadap badan, orang, nyawa, dan harta benda, walaupun bermuatan politik, tidak akan dianggap sebagai tindak pidana politik menurut Perjanjian ini.
 4. Ekstradisi dapat tidak dikabulkan apabila Pihak Diminta memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang dimintakan ekstradisi sesuai dengan hukum nasionalnya. Dalam keadaan tersebut, Pihak Diminta memiliki kewajiban untuk menuntut pelaku ke Pengadilan atas tindak pidana yang diajukan ekstradisinya sesuai dengan hukum nasionalnya. Dalam hal Pihak Berwenang dari Pihak Diminta memutuskan untuk tidak menuntut atau apabila penuntutan tidak dapat dilaksanakan karena atas alasan apapun, maka permintaan ekstradisi harus dipertimbangkan kembali.
 5. Apabila, dalam keadaan tertentu, Pihak Diminta dengan mempertimbangkan keseriusan tindak pidana dan kepentingan Pihak Peminta, beranggapan, karena keadaan pribadi orang yang diminta seperti umur, keadaan fisik, atau mental, yang karena hal tersebut maka ekstradisi tidak sejalan dengan pertimbangan kemanusiaan, ekstradisi dapat tidak dikabulkan.
 6. Dalam hal ekstradisi tidak diterima, Pihak Peminta harus diberitahu tentang penolakan permintaan ekstradisi dan alasan yang relevan.

PASAL 4

WARGA NEGARA

1. Tidak satu Pihak pun terikat untuk mengekstradisikan warga negaranya menurut Perjanjian ini.

2. Apabila ekstradisi ditolak hanya berdasarkan kewarganegaraan orang yang diminta dan yang bersangkutan dicari untuk menjalani penuntutan di Pihak Peminta, Pihak Diminta wajib berdasarkan permintaan Pihak Peminta, menyerahkan kasus tersebut kepada Pihak berwenangnya untuk menjalani penuntutan. Pihak Peminta wajib untuk mengirimkan seluruh berkas, informasi, alat, dan dokumen terkait dengan kejahatannya kepada Pihak Diminta sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menurut pasal ini, kewarganegaraan orang yang dicari tersebut harus ditentukan berdasarkan kewarganegaraannya pada saat tindak pidana yang dimintakan ekstradisi itu dilakukan.

PASAL 5

OTORITAS PUSAT DAN TATA CARA KOMUNIKASI

1. Untuk tujuan Perjanjian ini, Otoritas Pusat yang ditunjuk oleh Para Pihak saling berkomunikasi satu dengan yang lain mengenai hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian ini melalui saluran diplomatik.
2. Otoritas Pusat yang terdapat dalam Ayat 1 dari Pasal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Kehakiman Republik Islam Iran.
3. Apabila salah satu Pihak mengganti Otoritas Pusat yang ditunjuk, Pihak tersebut memberitahukan kepada Pihak lainnya atas perubahan tersebut melalui saluran diplomatik.

PASAL 6

PERMINTAAN EKSTRADISI DAN DOKUMEN

1. Permintaan ekstradisi harus disertai sebagai berikut:
 - a. Deskripsi tentang orang yang dicari, termasuk nama lengkap, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, tanggal lahir, dan identifikasi lainnya, dan jika ada, pekerjaan, kemungkinan lokasi orang yang diminta, ciri-ciri fisik, foto, sidik jari orang dimaksud apabila tersedia serta informasi lainnya yang dapat membantu untuk mengidentifikasi dan menemukan orang dimaksud;
 - b. Keterangan singkat mengenai fakta-fakta kasus, uraian tindak pidana yang dimintakan ekstradisinya, termasuk waktu dan tempat dilakukannya tindak

pidana dan ancaman hukuman yang ditetapkan menurut ketentuan hukum Pihak Peminta;

- c. Naskah ketentuan hukum yang menetapkan adanya tindak pidana dan ancaman hukumannya.
2. Apabila permintaan ekstradisi dimaksudkan untuk tujuan penuntutan, permintaan tersebut harus disertai dengan surat perintah penahanan dari pengadilan atau Pihak Berwenang lainnya yang bertujuan untuk ekstradisi atau bukti terkait lainnya yang memiliki akibat yang sama.
3. Apabila permintaan ekstradisi dimaksudkan untuk tujuan pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang diminta, permintaan tersebut harus disertai dengan sebuah salinan resmi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pernyataan mengenai masa hukuman yang telah dijalani dan masa hukuman yang masih harus dijalani.
4. Suatu permintaan ekstradisi berdasarkan Perjanjian ini harus ditandatangani dan dibubuhi stempel secara resmi oleh Pihak Berwenang dari Pihak Peminta.
5. Permintaan ekstradisi dan seluruh komunikasi terkait dengan ekstradisi tersebut harus dibuat dalam bahasa Pihak Peminta dan dengan melampirkan terjemahan dalam bahasa Pihak Diminta atau bahasa Inggris.

PASAL 7

INFORMASI TAMBAHAN

Jika Pihak Diminta menganggap bahwa informasi yang disampaikan untuk mendukung permintaan ekstradisi tidak cukup untuk mempertimbangkan permintaan tersebut, Pihak Diminta dapat meminta informasi tambahan untuk disampaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permintaan informasi tambahan tersebut atau dalam jangka waktu yang disepakati Para Pihak.

PASAL 8

PENYERAHAN SUKARELA

Apabila orang yang diminta menyatakan di dalam persidangan selama proses ekstradisi bahwa yang bersangkutan secara sukarela bersedia untuk diserahkan kepada Pihak Peminta, sesuai dengan hukum nasional Pihak Diminta, Pihak Diminta dapat menyerahkan orang tersebut secepat mungkin tanpa melanjutkan proses persidangan ekstradisi.

PASAL 9

PENAHANAN SEMENTARA

1. Dalam keadaan mendesak, salah satu Pihak dapat mengajukan kepada Pihak lainnya permintaan penahanan sementara terhadap seorang buronan untuk kepentingan ekstradisi sebelum permintaan ekstradisi resmi disampaikan, permintaan tersebut disampaikan secara tertulis melalui saluran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Perjanjian ini, *International Criminal Police Organization* – INTERPOL, atau saluran komunikasi lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.
2. Permintaan penahanan sementara harus memuat informasi sebagaimana tertera dalam Pasal 6 Ayat (2) Perjanjian ini, pernyataan bahwa telah dikeluarkan surat perintah penahanan, dan pernyataan bahwa permintaan resmi ekstradisi atas orang yang dimintakan tersebut akan disampaikan setelah adanya penahanan sementara melalui saluran sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
3. Pihak Diminta harus segera memberitahu Pihak Peminta mengenai hasil permintaan penahanan sementara.
4. Seseorang yang ditahan sementara harus dibebaskan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari masa penahanannya, Pihak Berwenang dari Pihak Diminta belum menerima permintaan resmi ekstradisi.
5. Pembebasan orang berdasarkan Ayat (4) Pasal ini tidak menghalangi penahanan kembali dan pelaksanaan proses ekstradisi orang dimaksud jika Pihak Diminta telah menerima permintaan resmi ekstradisi.

PASAL 10

KEPUTUSAN ATAS PERMINTAAN EKSTRADISI

1. Pihak Diminta harus mempertimbangkan permintaan ekstradisi yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan hukum nasionalnya, dan harus segera memberitahukan keputusannya kepada Pihak Peminta.
2. Apabila Pihak Diminta menolak seluruh atau sebagian dari permintaan ekstradisi tersebut, alasan penolakan harus diberitahukan kepada Pihak Peminta.

PASAL11
PENYERAHAN

1. Apabila permintaan ekstradisi telah dikabulkan oleh Pihak Diminta, para Pihak harus menyepakati waktu, tempat dan hal relevan lainnya terkait dengan penyerahan orang yang diminta. Pihak Diminta harus memberitahu Pihak Peminta mengenai jangka waktu penahanan yang telah dijalani orang yang dicari sebelum penyerahan dilakukan.
2. Apabila Pihak Peminta tidak mengambil alih orang yang dicari dalam waktu 15 (lima belas) hari yang dapat diperpanjang hingga 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal yang disepakati untuk penyerahan, Pihak Diminta harus segera membebaskan orang tersebut dan dapat menolak untuk mempertimbangkan permintaan baru yang diajukan Pihak Peminta untuk mengekstradisi orang tersebut atas tindak pidana yang telah dimintakan ekstradisi.
3. Apabila suatu Pihak tidak dapat menyerahkan atau mengambil alih orang yang akan diekstradisikan dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan alasan yang di luar kendalinya, Pihak lainnya harus segera diberitahu. Para Pihak harus menyepakati waktu dan tempat yang baru dan hal relevan untuk pelaksanaan ekstradisi berdasarkan hukum nasional yang berlaku dari Para Pihak. Dalam hal ini, ketentuan Ayat (2) Pasal ini harus diberlakukan.

PASAL12
PENUNDAAN DAN PENYERAHAN SEMENTARA

1. Apabila orang yang diminta sedang dalam proses hukum atau sedang menjalani hukuman pada Pihak Diminta untuk tindak pidana selain tindak pidana untuk yang dimintakan ekstradisinya, Pihak Diminta, setelah memutuskan untuk mengabulkan ekstradisi, dapat menunda ekstradisi sampai selesainya proses hukum atau selesainya hukuman tersebut. Pihak Diminta harus memberitahu Pihak Peminta mengenai penundaan tersebut.
2. Apabila penundaan ekstradisi dapat secara serius menghambat proses hukum pada Pihak Peminta, Pihak Diminta dapat, atas permintaan, menyerahkan sementara orang yang diminta kepada Pihak Peminta, dengan ketentuan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung tidak terhambat, dan Pihak

Peminta menjamin untuk mengembalikan orang tersebut dengan segera dan tanpa syarat setelah berakhirnya proses hukum terkait.

PASAL 13

PERMINTAAN BERSAMAAN

Apabila permintaan ekstradisi untuk orang yang sama diterima dari dua negara atau lebih, baik untuk tindak pidana yang sama maupun berbeda, untuk menentukan ke negara mana orang tersebut akan diekstradisi, Pihak Diminta harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Apakah permintaan tersebut dibuat berdasarkan suatu Perjanjian;
- b. Tingkat keseriusan tindak pidana;
- c. Waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana;
- d. Kewarganegaraan orang yang dicari dan korban;
- e. Tanggal masing-masing permintaan dimaksud; dan
- f. Kemungkinan ekstradisi selanjutnya ke negara lain.

PASAL 14

EKSTRADISI ULANG

Apabila orang yang diekstradisi masuk kembali ke wilayah Pihak Diminta sebelum penghentian penuntutan, proses atau pelaksanaan hukuman, maka dapat diekstradisi lagi berdasarkan permintaan dari Pihak Peminta. Dalam hal ini, penyerahan dokumen yang disebut dalam Pasal 6 Ayat (2) dalam Perjanjian ini tidak diperlukan.

PASAL 15

ASAS KEKHUSUSAN

Orang yang diekstradisi berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh diproses hukum ataupun menjalani hukuman pidana pada Pihak Peminta atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut sebelum penyerahannya selain tindak pidana yang permintaan ekstradisinya dikabulkan, ataupun orang tersebut tidak boleh diekstradisi lagi ke negara ketiga, kecuali:

- a. Pihak Diminta telah menyetujui sebelumnya. Untuk tujuan pemberian persetujuan dimaksud, Pihak Diminta dapat mensyaratkan penyerahan dokumen dan informasi yang dinyatakan dalam Pasal 6 Perjanjian ini;
- b. Orang tersebut belum meninggalkan wilayah Pihak Peminta dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah mendapatkan kebebasan untuk meninggalkan wilayah Pihak Peminta atau orang tersebut telah secara sukarela kembali ke wilayah Pihak Peminta setelah meninggalkan wilayah tersebut. Namun, jangka waktu tersebut tidak termasuk waktu apabila orang tersebut tidak dapat meninggalkan Pihak Peminta untuk alasan-alasan di luar kendalinya; atau
- c. Setiap tindak pidana yang lebih ringan diungkapkan dengan fakta-fakta untuk tujuan memastikan kembalinya orang yang dimintakan ekstradisinya, selain tindak pidana yang secara hukum tidak dapat dimintakan ekstradisinya.

PASAL 16

PENYERAHAN HARTA BENDA

1. Apabila Pihak Peminta meminta, Pihak Diminta harus, sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya, menyita hasil-hasil dan alat untuk melakukan tindak pidana dan harta benda lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti yang ditemukan di wilayahnya atau ditemukan berada dalam penguasaan orang yang dicari, dan apabila permintaan ekstradisi dikabulkan, Pihak Diminta harus menyerahkan harta benda tersebut kepada Pihak Peminta.
2. Apabila permintaan ekstradisi dikabulkan, harta benda sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal ini tetap dapat diserahkan, bahkan apabila ekstradisi tidak dapat dilaksanakan karena orang yang dicari meninggal dunia, hilang, atau melarikan diri, atau alasan lainnya.
3. Pihak Diminta dapat, untuk melaksanakan proses hukum lainnya yang masih tertunda, menunda penyerahan harta benda tersebut di atas sampai dengan selesainya proses tersebut, atau menyerahkan sementara harta benda tersebut dengan syarat bahwa Pihak Peminta menjamin untuk mengembalikannya.
4. Penyerahan harta benda dimaksud tidak boleh mengesampingkan setiap hak yang sah dari Pihak Diminta atau pihak ketiga lainnya atas harta benda itu. Apabila terdapat hak-hak dimaksud, Pihak Peminta harus, atas permintaan

Pihak Diminta segera mengembalikan harta benda yang diserahkan tanpa biaya kepada Pihak Diminta sesegera mungkin setelah selesainya proses hukum.

PASAL17

BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK

Setiap Pihak harus, sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya, saling memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana seluas-luasnya terkait dengan tindak pidana untuk ekstradisi yang telah dimintakan.

PASAL18

TRANSIT

1. Sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya, transit seseorang yang akan diekstradisi dari suatu negara ketiga ke salah satu Pihak melalui wilayah Pihak lainnya akan diizinkan berdasarkan permintaan yang disampaikan melalui saluran yang diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini. Izin transit tidak diperlukan dalam penggunaan transportasi udara dan tidak ada pendaratan yang dijadwalkan di wilayah Pihak yang digunakan sebagai tempat transit.
2. Apabila terjadi pendaratan tidak terjadwal di wilayah Pihak tersebut, Pihak tersebut dapat mensyaratkan Pihak lainnya untuk melengkapi permintaan transit sebagaimana ditetapkan pada Ayat (1) Pasal ini. Pihak tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya, dapat menahan orang yang akan diekstradisi tersebut untuk jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) jam sambil menunggu permintaan transit.

PASAL19

PEMBERITAHUAN HASIL

Pihak Peminta harus segera memberikan informasi kepada Pihak Diminta mengenai hasil persidangan pidana atau pelaksanaan hukuman terhadap orang yang diekstradisi atau informasi mengenai ekstradisi kembali orang tersebut ke negara ketiga.

PASAL 20

BIAYA

1. Biaya yang timbul dari prosedur ekstradisi pada Pihak Diminta akan ditanggung oleh Pihak tersebut. Biaya transportasi dan biaya transit yang berhubungan dengan penyerahan atau pengambilalihan orang yang diekstradisi akan ditanggung oleh Pihak Peminta.
2. Jika ternyata pelaksanaan permintaan tersebut membutuhkan biaya yang besar, Para Pihak harus berkonsultasi untuk menentukan dengan syarat dan dalam kondisi apa bantuan dapat diberikan.

PASAL 21

KEWAJIBAN INTERNASIONAL

Perjanjian ini tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak mengenai ekstradisi berdasarkan konvensi internasional atau pengaturan lainnya yang dalam hal ini mereka menjadi pihak.

PASAL 22

PENYELESAIAN PERBEDAAN

Setiap perbedaan yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan melalui konsultasi antara Para Pihak melalui saluran diplomatik.

PASAL 23

AMANDEMEN

Perjanjian ini dapat diubah setiap saat melalui kesepakatan tertulis Para Pihak. Amandemen dimaksud akan berlaku melalui prosedur yang sama dengan prosedur pemberlakuan Perjanjian ini.

PASAL 24

KETENTUAN PENUTUP

1. Para Pihak harus memberitahukan satu sama lain mengenai selesainya persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diterimanya pemberitahuan pemberlakuan yang paling akhir.

2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sewaktu-waktu dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Pengakhiran ini berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan mengenai pengakhiran dimaksud. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan memengaruhi permintaan ekstradisi yang telah disampaikan sebelum pengakhiran Perjanjian ini.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Perjanjian ini.

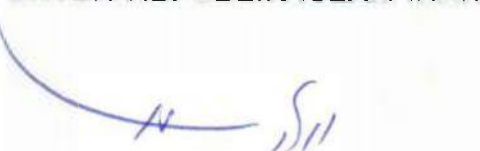
Perjanjian ini, terdiri dari satu pembukaan dan 24 (dua puluh empat) Pasal, dibuat di Tehran pada tanggal 14 bulan Desember tahun 2016, bertepatan dengan tanggal 24 bulan Azar tahun 1395 dalam Kalender Iran, dalam rangkap dua naskah asli, masing-masing berbahasa Indonesia, Persia, dan Inggris. Semua naskah adalah autentik. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK REPUBLIK INDONESIA



RETNO L. P. MARSUDI
MENTERI LUAR NEGERI

UNTUK REPUBLIK ISLAM IRAN



MOSTAFA POURMOHAMMADI
MENTERI KEHAKIMAN



REPUBLIK INDONESIA

معاهده
میان
جمهوری اندونزی
و
جمهوری اسلامی ایران
در زمینه
استرداد مجرمین

جمهوری اندونزی و جمهوری اسلامی ایران که از این پس "طرف‌ها"
نامیده می‌شوند،
با تمایل به برقراری همکاری مؤثرتر بین دو کشور در زمینه
پیشگیری و مبارزه با جرم؛
بر پایه احترام متقابل به اصول حاکمیت، برابری و منافع
متقابل؛
به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1

تعهد به استرداد

هر یک از طرف‌ها با رعایت مفاد این معاهده و قوانین داخلی
مربوط خود، با استرداد هر شخصی که طرف درخواست‌کننده برای
پیدگردد، محاکمه یا اجرای مجازات به دلیل ارتکاب جرم قابل
استرداد خواستار وی است و در قلمرو طرف درخواست‌شونده یافت شود،
موافقت خواهد نمود، اعم از اینکه جرم مذکور پیش یا پس از لازم-
الاجرا شدن این معاهده ارتکاب یافته باشد.

ماده 2

جرایم قابل استرداد

1. جرمی قابل استرداد خواهد بود که به موجب قوانین هر دو طرف مستوجب کیفر حبس، به مدت حداقل یک سال، یا مجازاتی شدیدتر باشد.
2. جرمی قابل استرداد خواهد بود که شامل بر تلاش یا تبانی برای ارتکاب، مساعدت یا معاونت، معاونت یا تعریک به ارتکاب یا تمهید مقدمات ارتکاب جرایم ملکی در زند 1 این ماده باشد.
3. از نظر این ماده، در تعیین این که فعل ادعایی، که موجب این دو طرف جرم یعنی می‌شود یا نمی‌شود، این که قوانین دو طرف عمل ادعایی شخص فراری را در طبقه بندی یکسان قرار می‌دهند یا با تفاسیحات متفاوتی می‌کنند یا نمی‌کنند، اهمیتی نخواهد داشت. همچنین کلیت فعل ادعایی فارغ از هر گونه اختلاف در عناصر تشکیل دهنده جرم مسترداد در نظر گرفته خواهد شد.
4. در صورتی که درخواست استرداد شامل چند جرم یا شخص و برخی از این جرایم به موجب قوانین طرف‌ها دارای مجازات حداقل یک سال زند یا انباشته، استرداد برای همه جرایم تعلق می‌تواند انحصار شود، مشروط بر اینکه دیگر الزامات را طبق مفاد این ماده محقق نمایند و حداقل شامل یک جرم قابل استرداد برای انجام استرداد باشد.
5. در مواردی که استرداد شخص به دلیل ارتکاب جرم بر خلاف قوانین صالح‌ترین، عوارض گمرکی، نظارت بر مرزها، ارز، یا دیگر موارد مرتبط با درآمد‌ها، درخواست شده باشد، از استرداد صرفاً به این دلیل که قوانین طرف درخواست شونده چنین صالحیت، یا عوارض وضع نکرده، یا کالیات، عوارض گمرکی یا مقررات ارزی مستأبه قوانین طرف درخواست کننده را پیش‌بینی نکرده است، امتناع نخواهد شد.
6. بدون خیاره وارد کردن به زند 4 ماده 3 این ماده علی‌رغم این که فعل موضوع استرداد کلاً یا جزئاً در طرف درخواست شونده واقع شده باشد، آن جرم به موجب مفاد این ماده قابل استرداد خواهد بود مشروط بر اینکه قوانین آن طرف، فعل مذکور، عواقب و اثرات مورد نظر آن، به صورت کلی به معنای ارتکاب جرم قابل استرداد در قلمرو طرف درخواست کننده تلقی شود.

7. چنانچه درخواست استرداد با هدف اجرای حکم باشد، مدت باقی مانده از حکم مربوط به جرم قابل استرداد، نباید کمتر از شش ماه باشد.

ماده 3

امتناع از استرداد

1. استرداد در موارد زیر پذیرفته نخواهد شد:

الف) چنانچه جرمی که استرداد برای آن تقاضا می‌شود جرم سیاسی باشد؛

ب) چنانچه طرف درخواست کننده بر مبنای دلایل اساسی بد این اعتقاد باشد که درخواست استرداد به قصد تعقیب یا مجازات شخص مورد درخواست به دلیل نژاد، سن، مذهب، ملیت، قومیت یا اعتقادات سیاسی نامبرده صورت گرفته است؛ یا اینکه فرد مذکور تنها بر هر یک از عمل مذکور، مسئول رفتار ناعادلانه در برپایان رسیدگی قضایی قرار می‌گیرد؛

پ) چنانچه جرمی که موجب درخواست استرداد شده، جرم نظامی باشد؛ که مرتبه حقوق جزای عمومی ایجاد صرف جرم نباشد. متن
ت) چنانچه به موجب قوانین طرف درخواست کننده شخص مورد درخواست است در دلیل مرور زمان قابل مجازات نباشد یا حکم وی به دلیل عدم قابل اجرا نباشد.

ث) حتاکجه حکم نهایی در طرف درخواست شونده در مورد شخص مورد درخواست در خصوص جرمی که موضوع درخواست بوده، صادر شده باشد.

ج) چنانچه به موجب قانون ارف درخواست کننده جرم موضوع استرداد کشور مقصد است؛ یا در حالی که به موجب قوانین طرف درخواست کننده جرم مزبور صورت گیرد؛ اعداد مجازات آن که طرف درخواست کننده تضمین مسمیمه چنانچه شخص مزبور محکوم به اعدام شود؛ مجازات اعدام اجرا نخواهد شد.
2. از نظر این معاهده، موارد زیر جرائم سیاسی محسوب نمی-

شوند:

الف) جرم سوء قصد علیه جان یک شخص رئیس حکومت یا رئیس دولت، یا عضو اعضای بلافصل خانواده ایشان؛

با) جر می که به موجب کنوانسیون بین المللی که دو طرف با توجه به هویت در آن، نسبتاً به استرداد یا تعقیب شخص مورد درخواست یا ارا که بدون تأخیر و پر وجه پرونده به مقاصد ملاحظه خود جهت رسیدگی به تاجرم، تعهد دارند؛

پا) جرم مربوط به تروریسم باشد؛

ت) اقدام یا تبادلی جهت ارتکاب جرایم فوق یا همدستی به عنوان معاونت شخصی که جرایم مزبور را مرتکب می‌شود یا جهت ارتکاب تلاش می‌نماید.

3. جرایم شدید علیه جسم، شخص، حیات و اموال، حتی سیاسی، از نظر این معاهده جرم سیاسی تلقی نخواهد شد.

4. چنانچه طرف درخواست شونده به مرجع فوائدهای خود در مورد جرم موضوع استرداد، دارای اوجیت باشد، استرداد پذیرفته نخواهد شد، در چنین شرایطی طرف درخواست شونده تعهد میدهد تا در صورت درخواست را به خاطر جرم موضوع درخواست دهد، چنانچه مقامات صلاحیتدار طرف درخواست شونده، تصمیم به عدم پیگرد در مورد مزبور بگیرند یا تعجب پیگرد فرار دادن به هر دلیل دیگری امکان پذیر باشد، درخواست استرداد مورد رسیدگی مجدد قرار خواهد گرفت.

5. چنانچه در موارد استثنای پس، طرف درخواست شونده، با در نظر گرفتن شایستگی و منافع طرف درخواست کننده بر این عقیده باشد که به دلیل شرایط شخصی شخص مورد درخواست مثل سن و شرایط روحی یا جسمی، استرداد با ملاحظات بشری و ستانه سازگاری ندارد، استرداد ممکن است پذیرفته نشود.

6. در مواردی که استرداد پذیرفته نشود، طرف درخواست کننده، از رد درخواست استرداد و دلیل مربوطه آگاه خواهد شد.

ماده 4 اتباع

1. هیچ یک از طرفها به موجب این معاهده متعهد به استرداد اتباع خود نخواهد بود.
2. مرگه درخواستی استرداد تنها بر اساس تابعیت شخص مورد درخواست شده و شایستگی مذکور در طرف درخواست کننده تحت تعقیب باشد طرف درخواست است نشده به نسبت طرف درخواست کننده

پرونده را جهت رسیدگی به مقامات ملاحظه‌دار خود ارجاع خواهند داد.
طرف درخواست کننده همه پرونده‌ها، اطلاعات، آلات و اسناد مربوط به جرم را به طرف درخواست سوبه به نحو مقتضی ارسال خواهد کرد،
3. از نظر این ماده، بیت شخص مورد درخواست بر اساس تابعیت وی در زمان تکلیف ارجاع جرمی که برای آن درخواست استرداد شده است، در نظر گرفته می‌شود.

ماده 5

مقامات مرکزی و روش ارتباط

1. به منظور اجرای این ماده، مراجع مرکز، تعیین شده توسط طرفها در مورد موهوماتی که در حیطه شمول این ماده قرار می‌گیرند، با یکدیگر از طریق مجاری دیپلماتیک ارتباط برقرار خواهند کرد.
2. مراجع مرکزی مفعولین 1 این ماده و وزارت دادگستری برای جمع‌آوری اسلیمی ایران و وزارت قانون و حقوق بشر برای جمع‌آوری اندوختنی خواهند بود.
3. هرگاه یکی از طرفها، مقام مرکزی خود را تغییر دهد، طرف دیگر را از تغییر مزبور از طریق مجاری دیپلماتیک آگاه کند.

ماده 6

درخواست استرداد و مدارک

1. درخواست استرداد با موارد زیر همراه خواهد بود:
الف) مشخصات شخص مورد درخواست، شامل نام کامل، سن، جنسیت، تابعیت، تاریخ تولد و هرگونه مشخصات دیگر، در صورت امکان، شغل، محل اقامت احتمالی شخص، شرح خصوصیات ظاهری، عکس، اثر انگشت شخص در صورت وجود و سایر اطلاعاتی که به شناسایی و موفقیت مکانی وی کمک نماید.

ب) شرح مختصر وقایع پرونده، شرح جرمی که برای آن درخواست استرداد شده است، از جمله زمان و محل ارتکاب جرم و مراتب در نظرگرفته شده برای آن به موجب قوانین طرف درخواست کننده؛
پ) متن مقررات قانونی که جرم و مجازات را تعیین می‌کند؛

2. چنانچه درخواست استرداد مرتبط با تعیین باشد، نسخه ای از دستور دستگیر گردیده توسط دادگاه یا مقامات صلاحیت دار دیگر به منظور استرداد صادر گردد بده، یا هر سند دیگر با اثر یکسان، پیوست درخواست خواهد شد.
3. چنانچه درخواست استرداد مربوط به اجرای حکم وضع شده در مورد شخص مورد، خواست باشد، نسخه تهیه شده حکم نهایی و گواهی مدت زمان سپری شده از حکم و مدت باقی مانده از آن پیوست درخواست خواهد شد.
4. درخواست استرداد به موجب این معاهده توسط مقام صلاحیت دار طرف درخواست کننده امضا و مهر خواهد شد.
5. درخواست استرداد و تمام مکاتبات مربوط به آن به زبان طرف درخواست کننده و همراه با ترجمه آن به زبان طرف درخواست شونده یا انگلیسی خواهد بود.

ماده 7

اطلاعات اضافی

هرگاه طرف درخواست شونده چنین تشخیص دهد که اطلاعات ارسال در تأیید درخواست استرداد برای رسیدگی به درخواست کافی نیست، طرف درخواست شونده مسئولی خواهد بود که در زمان وصول درخواست یا ظرف مدت زمانی که بین طرفها توافق می شود، درخواست اطلاعات اضافی نماید.

ماده 8

تسلیم داوطلبانه

چنانچه شخص مورد در خواست به صراحت طی جریان رسیدگی استرداد در برابر دادگاه تسلیم نه تسلیم داوطلبانه خواهد بود به طرف درخواست کننده اعلام رضایت کند، طرف درخواست شونده یا رعایت قانون داخلی خود شخص مزبور را بدون فوت وقت و بدون جریان رسیدگی های دیگر استرداد، تسلیم خواهد کرد.

ماده 9

بازداشت موقت

1. در موارد اضطراری، یک طرف می‌تواند در مورد شخص فراری به منظور استرداد، پیش از ارائه درخواست رسمی، از طرف دیگر درخواست بازداشت موقت کند، چنین درخواستی کتباً و از طریق مجاری پیش بینی شده در ماده 5 این معاهده، سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپل) یا دیگر مجاری مورد توافق طرفها صورت خواهد گرفت.
2. درخواست بازداشت موقت حاوی اطلاعات مذکور در بند 2 ماده 6 این معاهده، بیانیه مربوط به وجود قرار بازداشت و بیانیه مبنی بر اینکه درخواست رسمی استرداد شخص پس بازداشت موقت صادر خواهد گردید، از طریق مجاری پیش بینی شده در ماده 5 این معاهده خواهد بود.
3. طرف درخواست شونده فوری طرف درخواست کننده را از نتیجه درخواست بازداشت موقت مطلع خواهد نمود.
4. شخصی که به طور موقت بازداشت شده است چنانچه مقامات صلاحیتدار طرف درخواست شونده ظرف مدت 30 (سی) روز درخواست رسمی استرداد را دریافت ننموده باشند، آزاد خواهد شد.
5. آزادی شخص بر اساس بند 4 این ماده مانع بازداشت مجدد و انجام جریان رسیدگی استرداد شخص مزبور چنانچه طرف درخواست شونده درخواست رسمی استرداد را دریافت کرده باشد، نمی باشد.

ماده 10

تصمیم گیری در زمینه درخواست استرداد

1. طرف درخواست شونده، درخواست استرداد ارائه شده به موجب این معاهده را طبق تشریفات تعیین شده به موجب قانون داخلی خود بررسی خواهد کرد و فوری تصمیم خود را به اطلاع طرف درخواست کننده خواهد رساند.
2. چنانچه طرف درخواست شونده با تمام یا بخشی از درخواست استرداد مخالفت نماید، دلایل مخالفت را به طرف درخواست کننده اعلام خواهد کرد.

ماده 11

تسلیم

1. چنانچه طرف درخواست هونده با درخواست استرداد موافقت نماید، طرف‌ها در مجموع مکان، زمان و دیگر موثرات مرتبط با تسلیم شخص مورد درخواست توافق خواهند نمود، طرف درخواست هونده مدت زمانی را که شخص مورد درخواست تا پیش از تسلیم در برده است به اطلاع طرف درخواست کننده خواهد رسانید.
2. اگر طرف درخواست کننده ظرف مدت 15 روز از تاریخ اجرای تسلیم، روز تمدید شود، از تاریخ مورد توافق برای شخص درخواست را تحویل نگیرد، طرف درخواست هونده آن شخص‌خوا آزاد خواهد کرد و می‌تواند هر درخواست جدید را از جانب طرف دعوای استرداد استرداد آن شخص در مورد جرمی که به خاطر آن استرداد درخواست شده است را رد کند.
3. اگر طرف دعوانده دلیلی خارج از خود ظرف مدت توافق شده شخص مورد درخواست را تسلیم نمی‌کند، طرف دعوای از این امر خواهد کرد. طرف‌ها در مورد زمان و مکان جدید و موضوعات مربوط به اجرای استرداد با رعایت قوانین داخلی خود توافق خواهند نمود. در این صورت مفاد بند 2 این ماده اعمال خواهد گردید.

ماده 12

تعویق و بازادامه موفقیت

و. تسلیم

1. اگر علیه شخص وی درخواست در قلمرو طرف درخواست هونده اقامه دعوی شده، یا در حال تحمل محکومیت به دلیل جرمی غیر از جرمی باشد که یا نظر آن درخواست است داد گردد است، طرف درخواست تسلیم خود را از تعویق پیش از تسلیم شخص مورد پذیرش استرداد، سؤالات و حیاتی تا جریان رسیدگی‌ها یا اجرای حکم به تعویق اندازد. در چنین حالتی طرف درخواست هونده طرف درخواست کننده را از تعویق مطلع خواهد کرد.
2. اگر تعویق استرداد، به صورت جدی رسیدگی‌های جزائی در طرف درخواست کننده را دچار مشکل نماید، طرف درخواست هونده می‌تواند بنا به درخواست شخص مورد درخواست را موقتاً به طرف درخواست کننده

تحویل دهد مشروط بر اینکه جریان رسیدگی‌های جاری آن با ممانعت مواجه نشود. طرف درخواست کننده تقبیل نماید که شخص مزبور را پس از اتمام جریان رسیدگی‌های مربوط بدون قید شرط و فوری عودت دهد.

ماده 13

تقاضای همزمان

اگر درخواست استرداد شخص واحدی از سوی دو یا چند کشور برای جرم واحد یا جرایم متفاوت دریافت شود، طرف درخواست شونده به منظور تعیین کشوری که شخص قرار است به آن مسترد شود، کلیه عوامل مربوط از جمله اما نه منحصر به عوامل زیر را در نظر خواهد گرفت:

- (الف) این که درخواست بر اساس معاهده ارائه شده باشد؛
- (ب) شدت جرم؛
- (پ) زمان و مکان ارتکاب جرم؛
- (ت) تابعیت شخص مورد درخواست و قربانی (قربانیان)؛
- (ث) تاریخ هر یک از درخواست‌ها؛ و
- (ج) امکان استرداد مجدد به کشور دیگر.

ماده 14

استرداد مجدد

اگر شخص مسترد شده قبیل از خاتمه پیگیری، جریان رسیدگی یا اجرای حکم به قلمرو طرف درخواست شونده بازگردد، او را می‌توان مجدداً بر اساس درخواست طرف درخواست کننده مسترد نمود. در چنین مواردی، ارائه مدارک ذکر شده در بند 2 ماده 6 این معاهده دیگر نیازی نیست.

ماده 15

قاعده اختصاصی بودن

شخصی که طبق این معاهده مسترد می‌شود در طرف درخواست کننده به غیر از جرمی که به خاطر آن درخواست استرداد داده شده، برای هیچ جرمی که قبیل از تسلیم، مرتکب شده است، تحت پیگرد جزایی قرار نخواهد گرفت، یا حکمی در مورد وی به اجرا گذاشته نخواهد

شد و شخص مزبور به کشور ثالثی مسترد نخواهد گردید مگر در موارد زیر:

الف) طرف درخواست شونده قبلاً موافقت نموده باشد. طرف درخواست شونده می‌تواند برای چنین موافقتی درخواست دریافت اطلاعات و اسناد قید شده در ماده 6 این معاهده را بنماید.

ب) شخص مزبور ظرف مدت 15 (پانزده) روز از زمانی که به وی اجازه داده شده است قلمرو طرف درخواست کننده را ترک نکرده یا پس از ترک به صورت داوطلبانه مراجعت کرده باشد. در هر حال این مدت شامل دوره زمانی نمی‌گردد که شخص به دلایل خارج از کنترل خود نمی‌توانسته از قلمرو طرف درخواست کننده خارج شود، یا

پ) هر جرم خفیف دیگری غیر از جرم مبنای درخواست استرداد که بر اساس وقایع و با هدف تأمین بازگشت فرد احراز گردیده باشد.

ماده 16

تسلیم اموال

1. طرف درخواست شونده بر اساس درخواست طرف درخواست کننده تا آنجا که قوانین ملی آن اجازه می‌دهد، منافع حاصل از جرم، ابزار جرم و سایر دارایی‌هایی را که می‌تواند به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو طرف درخواست شونده یافت می‌شود، یا در اختیار شخص مورد درخواست باشد، توقیف نموده و چنانچه با استرداد موافقت شود، این اموال را به طرف درخواست کننده تحویل خواهد داد.

2. در صورت موافقت با استرداد، اموال ذکر شده در بند 1 این ماده، حتی اگر استرداد شخص به دلایل فوت، غیبت، فرار شخص مورد درخواست یا هر دلیل دیگری انجام نشود، به طرف درخواست کننده تحویل خواهد گردید.

3. طرف درخواست شونده می‌تواند به منظور پیشبرد هرگونه رسیدگی کیفری در جریان، تحویل اموال فوق را تا پایان رسیدگی‌های مذکور به تعویق اندازد یا به شرط این که طرف درخواست کننده اعاده آن را تعهد کند، اموال مزبور را موقتاً در اختیار قرار دهد.

4. تسلیم چنین اموالی به حقوق مشروع طرف درخواست شونده یا طرف ثالث نسبت به اموال مزبور خدش‌های وارد نخواهد ساخت. طرف

درخواست کننده در صورت وجود حقوق مزبور و بنا به درخواست طرف درخواست شونده اموال تحویل داده شده را بدون تغییر پس از پایان رسیدگی‌ها، در اسرع وقت عودت خواهد داد.

ماده 17

معاضدت حقوقی دوجانبه

هرطرف تا جایی که طبق قوانین خود مجاز شده است، در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در مورد موضوعات کیفری مرتبط با جرمی که برای آن درخواست استرداد شده است، گسترده‌ترین تمهیدات را برای طرف دیگر فراهم خواهد کرد.

ماده 18

عبور

1. عبور شخصی که قرار است به یک طرف توسط کشور ثالث از طریق طرف دیگر مسترد شود، بنا به درخواستی که از مجاری پیش بینی شده در ماده 5 این معاهده ارائه شده است، تا حدی که قانون اجازه داده باشد، مجاز شمرده خواهد شد. چنانچه حمل و نقل هوایی مورد استفاده قرار گیرد و فرود در قلمرو طرف محل عبور برنامه ریزی نشده باشد، کسب اجازه ضرورت نخواهد داشت.

2. در صورت فرود پیش بینی نشده هواپیما در قلمرو طرف محل عبور، ممکن است از طرف عبور دهنده درخواست شود مطابق بند 1 این ماده برای عبور درخواست نماید. طرف مذکور تا جایی که مخالف با قوانین داخلی آن نباشد شخص را برای مدت 72 (هفتاد و دو) ساعت و تا زمان درخواست عبور در بازداشت نگه دارد.

ماده 19

اعلام نتیجه اقدامات

طرف درخواست کننده باید فوری طرف درخواست شونده را از نتایج دادرسی کیفری یا اجرای محکومیت علیه شخص مورد استرداد یا اطلاعات مربوط به استرداد مجدد آن شخص به کشور ثالث آگاه کند.

ماده 20

هزینه ها

1. تمام هزینه‌های مربوط به تشریفات استرداد در قلمرو طرف درخواست شونده توسط آن طرف تقبل خواهد شد. هزینه‌های مربوط به انتقال و هزینه‌های عبور در ارتباط با تسلیم یا تحویل شخص مسترد شده بر عهده طرف درخواست کننده خواهد بود.
2. اگر مشخص شود که اجرای درخواست نیاز به هزینه‌های زیادی دارد، طرفها باید برای تعیین قیود و شرایطی که به موجب آنها معاضدت می‌تواند ارائه گردد، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 21

تعهدات بین المللی

این معاهده بر حقوق و تعهدات طرفها در رابطه با استرداد به موجب کنوانسیونها یا دیگر ترتیبات بین المللی که عضو آنها هستند، تأثیری نخواهد داشت.

ماده 22

حل و فصل اختلافات

هر گونه اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر این معاهده با مشورت بین طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

ماده 23

اصلاح

این معاهده می‌تواند در هر زمان با رضایت کتبی طرفها اصلاح شود. چنین اصلاحی از طریق همان تشریفات لازم‌الاجرا خواهد شد که برای لازم الاجرا شدن معاهده قابل اعمال است.

ماده 24
مقررات پایانی


1. طرفها یکدیگر را از تکمیل الزامات داخلی مربوط خود جهت لازم الاجرا شدن این معاهده مطلع خواهند نمود، این معاهده در سی-امین روز دریافت آخرین اطلاعیه لازم الاجرا خواهد شد.

2. هر یک از طرفها می‌تواند از طریق یادداشت کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر در هر زمان این معاهده را فسخ نماید. فسخ 6 (شش) ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت مزبور نافذ خواهد شد. فسخ این معاهده تاثیری بر درخواستهای استرداد که پیش از فسخ آن ارائه شده است، تاثیری نخواهد داشت.

در تایید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی از سوی دولت‌های متبوع خود مجاز شده‌اند، این معاهده را امضا نمودند.

این معاهده شامل یک مقدمه و 24 (بیست و چهار) ماده در تهران در تاریخ 14 دسامبر 2016 میلادی مطابق با 24 آذر 1395 هجری شمسی، در دو نسخه اصلی به زبانهای اندونزیایی، فارسی و انگلیسی که تمامی آنها دارای اعتبار یکسان می‌باشند، تنظیم گردید. در صورت هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی مرجح خواهد بود.

از طرف
جمهوری اسلامی ایران


مصطفی پورنژدی
وزیر دادگستری

از طرف
جمهوری اندونزی


رتنو لام. پ. مارسودی
وزیر امور خارجه



REPUBLIK INDONESIA

**TREATY
BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
ON
EXTRADITION**

The Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran (hereinafter referred to as "the Parties");

Desiring to make more effective cooperation between the two countries in the prevention and suppression of crime on the basis of mutual respect for sovereignty, equality, and mutual benefit;

Have agreed as follows:

**ARTICLE 1
OBLIGATION TO EXTRADITE**

Each Party agrees to extradite to the other Party, subject to the provisions of this Treaty and their respective domestic laws, any person who is found in the territory of the Requested Party and sought by the Requesting Party for prosecution, trial, or execution of punishment for an extraditable offence, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty.

**ARTICLE 2
EXTRADITABLE OFFENCES**

1. An offence shall be an extraditable offence, if it is punishable under the laws of both Parties, by imprisonment for a period of at least one year or by a more severe penalty.

2. An offence shall be an extraditable offence, if it consists of an attempt or a conspiracy to commit, aiding or abetting, counseling or procuring the commission of or being an accessory to the commission of an offence described in Paragraph 1 of this Article.
3. For the purpose of this Article, in determining whether the alleged conduct constitutes an offence under the laws of both Parties, it shall be immaterial whether the laws of both Parties place the alleged conduct of the fugitive within the same category of offence or denominate the offence by the same terminology. The totality of the alleged conduct shall be taken into account, regardless of any differences in the constituent elements of the offence for which the extradition is requested.
4. If the request for extradition includes several offences and some of them are not punishable for at least one year imprisonment under the laws of both Parties, extradition may be granted for all offences if they meet the other requirements in accordance with the provisions of the Treaty and include grant of extradition for at least one extraditable offence.
5. Where extradition of a person is sought for an offence against laws relating to taxation, customs, duties, foreign exchange control, or other revenue matters, extradition may not be refused on the grounds that the laws of the Requested Party do not impose the same kind of tax or duty or do not provide for a tax, duty, customs, or foreign exchange regulation of the same kinds of the laws of the Requesting Party.
6. Without prejudice to Article 3 (4) of this Treaty, an offence would be extraditable under this Treaty, notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or in part in the Requested Party. If under the laws of that Party this conduct and its effects, or its intended effects, taken as a whole, would be regarded as constituting the commission of an extraditable offence in the territory of the Requesting Party.
7. Where the extradition request is aimed at executing a sentence imposed, the sentence remaining to be served in an extraditable offence shall not be less than six months.

ARTICLE 3
REFUSAL OF EXTRADITION

1. Extradition shall not be granted where:
 - a. the offence for which the extradition is requested is a political offence;
 - b. the Requested Party has substantial grounds for believing that the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing the person sought on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin, political opinion, or that person may, for any of those reasons, be subjected to unfair treatment in judicial proceedings;
 - c. the offence for which extradition is requested is a military offence, which is not an offence under the ordinary criminal law;
 - d. the person sought cannot be prosecuted because of the lapse of time under the laws of the Requesting Party or his/her sentence cannot be enforced by reason of pardon;
 - e. a final judgment has been passed in the Requested Party against the person sought in respect of the offence for which the extradition is requested;
 - f. the offence for which extradition is requested is punishable by death penalty under the laws of the Requesting Party, while under the laws of the Requested Party such offence is not punishable by death penalty, unless the Requesting Party gives an assurance that if that person is awarded the death penalty, the same will not be carried out.
2. For the purpose of this Treaty, the following shall not be considered as political offences:
 - a. an offence against the life or person of the Head of State or the Head of Government or member(s) of their immediate family;
 - b. an offence under any international convention to which the Parties have the obligation by virtue of becoming a State Party thereto, to either extradite or prosecute the person sought or submit the case without undue delay to their Competent Authorities for the purpose of prosecution;
 - c. an offence related to terrorism;

- d. an attempt or conspiracy to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a person who commits or attempts to commit such an offence.
3. Serious offence against the body, person, life and property, even if politically motivated shall not be considered as a political offence for the purpose of this Treaty.
4. Extradition may not be granted where the Requested Party has jurisdiction over the offence for which the extradition is requested, under its national law. In such a situation, the Requested Party shall have the obligation to prosecute the person wanted in respect of the offence sought for in its courts in accordance with its laws. If the Competent Authorities of the Requested Party decide not to prosecute in such a case or the prosecution is not feasible because of whatever reason, the request for extradition shall be reconsidered.
5. When, in exceptional cases, the Requested Party while also taking into account the seriousness of the offence and the interests of the Requesting Party deem that because of the personal circumstances of the person sought such as age, physical or mental condition, where extradition would be incompatible with humanitarian consideration, extradition may not be granted.
6. In the event that the extradition is not accepted, the Requesting Party shall be informed of the refusal of the extradition request and the relevant reasons.

ARTICLE 4 NATIONALS

1. Neither of the Parties shall be bound to extradite its own nationals under this Treaty.
2. If extradition is refused solely on the basis of the nationality of the person sought and she/he is wanted for prosecution in the Requesting Party, the Requested Party shall at the request of the Requesting Party, submit the case to its Competent Authorities for prosecution. The Requesting Party shall send all of the files, information, instruments, and documents related to the crime to the Requested Party by appropriate means.
3. For the purpose of this article, nationality of the person sought shall be determined on the basis of his/her nationality at the time of the commission of an offence for which extradition is requested.

ARTICLE 5

CENTRAL AUTHORITIES AND MANNER OF COMMUNICATION

1. For the purpose of this Treaty, the Central Authorities designated by the Parties shall communicate with each other for matters that fall within the scope of this Treaty through the diplomatic channels.
2. The Central Authorities referred to in Paragraph 1 of this Article shall be the Ministry of Law and Human Rights for the Republic of Indonesia and the Ministry of Justice for the Islamic Republic of Iran.
3. Where either Party changes its designated Central Authority, it shall inform the other Party of such change through the diplomatic channels.

ARTICLE 6

EXTRADITION REQUEST AND DOCUMENTS

1. A request for extradition shall be accompanied with the following:
 - a. a description of the person sought including the full name, age, sex, nationality, date of birth, and any other identification, if any, occupation, probable location of the person, physical description, photographs, fingerprints of the person where available and other information that may help in identifying and locating that person;
 - b. a brief statement of the facts of the case, description of the offence for which extradition is requested, including the time and place of the commission of the offence and the punishment provided for it under the laws of the Requesting Party;
 - c. the text of the legal provisions determining the offence and the punishment.
2. If the request for extradition relates to the prosecution, it shall be accompanied by warrant of arrest issued by a court or other Competent Authorities for the purpose of extradition or any other evidence with the same effect;
3. Where the request for extradition relates to the executing of a sentence imposed on the person sought, it shall be accompanied by a certified copy of the final judgment and a statement of the period of sentence which has already been served and remain to be served.
4. A request for extradition under this Treaty shall be signed and sealed by the Competent Authority of the Requesting Party.

5. Extradition request and all communications related thereto shall be made in the language of the Requesting Party accompanied by a translation in the language of the Requested Party or English.

ARTICLE 7

ADDITIONAL INFORMATION

If the Requested Party considers that the information furnished in support of a request for extradition is not sufficient as to consider the request, the Requested Party may request additional information within 30 (thirty) days as of the receipt of the request or within a period as may be agreed between the Parties.

ARTICLE 8

VOLUNTARY SURRENDER

When a person sought explicitly consents before the court during extradition proceedings that he/she volunteers to be surrendered to the Requesting Party, the Requested Party, subject to its national law, may surrender the person as expeditiously as possible without further extradition proceedings.

ARTICLE 9

PROVISIONAL ARREST

1. In urgent cases, a Party may request the other Party for the provisional arrest of a fugitive for the purpose of extradition before a formal extradition request is submitted, such request shall be submitted in writing through the channels provided for in Article 5 of this Treaty, the International Criminal Police Organization – INTERPOL or other channels agreed by both Parties.
2. The request for provisional arrest shall contain the information indicated in Article 6 (2) of this Treaty, a statement of the existence of the warrant of arrest and a statement that a formal request for extradition against the person shall follow the provisional arrest, through the channels provided for in Article 5 of this Treaty.
3. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of the result of the request for provisional arrest.

4. The person arrested provisionally shall be released if within a period of 30 (thirty) days of his/her arrest, the Competent Authorities of the Requested Party have not received the formal request for extradition.
5. The release of the person pursuant to Paragraph 4 of this Article shall not prevent the subsequent re-arrest and institution of extradition proceedings of that person if the Requested Party has subsequently received the formal request for extradition.

ARTICLE 10

DECISION ON THE REQUEST FOR EXTRADITION

1. The Requested Party shall consider an extradition request made under this Treaty in accordance with the procedures provided under its national law, and shall promptly inform the Requesting Party of its decision.
2. If the Requested Party refuses the whole or any part of the request for extradition, the reasons for refusal shall be notified to the Requesting Party.

ARTICLE 11

SURRENDER

1. If the request for extradition has been granted by the Requested Party, the Parties shall agree on the time, place, and other relevant matters relating to the surrender of the person sought. The Requested Party shall inform the Requesting Party of the period of time for which the person sought was detained prior to the surrender.
2. If the Requesting Party has not taken over the person sought within 15 (fifteen) days which could be prolonged to 30 (thirty) days after the date agreed for surrender, the Requested Party shall release that person immediately and may refuse to consider a new request by the Requesting Party for extradition of that person for the offence for which the extradition has been requested.
3. If a Party fails to surrender or take over the person sought within the agreed period for reasons beyond its control, the other Party shall be notified promptly. The Parties shall agree on a new time and place and relevant matters for the execution of the extradition subject to their national laws. In this case, the provisions of Paragraph 2 of this Article shall apply.

ARTICLE 12
POSTPONEMENT AND TEMPORARY SURRENDER

1. If the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested Party for an offence other than that for which the extradition is requested, the Requested Party may, after having made a decision to grant extradition, postpone the extradition until the conclusion of the proceedings or the completion of the sentence, the Requested Party shall inform the Requesting Party of the postponement.
2. If the postponement of the extradition may seriously impede the criminal proceedings in the Requesting Party, the Requested Party may, upon request, temporarily surrender the person sought to the Requesting Party provided that its ongoing criminal proceedings are not hindered and that the Requesting Party undertakes to return that person unconditionally and immediately upon conclusion of relevant proceedings.

ARTICLE 13
CONCURRENT REQUEST

Where request for extradition of the same person are received from two or more countries, either for the same offence or for different offences, for the purpose of determining to which of those countries the person is to be extradited, the Requested Party shall consider all relevant factors, including but not limited to:

- a. whether the request was made pursuant to a treaty;
- b. the gravity of the offence;
- c. the time and place of the commissions of the offence;
- d. the nationality of the person sought and of the victim;
- e. respective dates of the requests; and
- f. the possibility of subsequent extradition to another country.

ARTICLE 14
RE-EXTRADITION

If the extradited person returns to the territory of the requested Party prior to the termination of prosecution, proceedings or execution of sentence, he/she may be extradited again based on the request of the Requesting Party. In such cases,

submission of documents mentioned in Article 6 (2) of this Treaty is no longer required.

ARTICLE 15
RULE OF SPECIALITY

The person extradited in accordance with this Treaty shall neither be proceeded against nor subjected to execution of sentence in the Requesting Party for an offence committed by that person before his/her surrender other than the offence for which the request for extradition is granted, nor shall that person be re-extradited to a third country, unless:

- a. the Requested Party has consented in advance. For the purpose of such consent, the Requested Party may require the submission of the documents and information mentioned in Article 6 of this Treaty;
- b. that person has not left the territory of the Requesting Party within 15 (fifteen) days after having been free to do so or that person has voluntarily returned to the Requesting Party after leaving it. However, this period of time shall not include the time during which that person fails to leave the Requesting Party for reasons beyond his/her control; or
- c. any lesser offence disclosed by the facts for the purpose of securing his/her return; other than an offence for which extradition could not lawfully be made.

ARTICLE 16
SURRENDER OF PROPERTY

1. If the Requesting Party so requests, the Requested Party shall, to the extent permitted by its national law, seize the proceeds and instruments of the offences and other property which may serve as evidence found in its territory or found in the possession of the person sought, and when the request for extradition is granted, shall surrender this property to the Requesting Party.
2. When the request for extradition is granted, the property mentioned in Paragraph 1 of this Article may nevertheless be surrendered even if the extradition cannot be carried out owing to the death, disappearance or escape of the person sought, or any other reasons.
3. The Requested Party may, for conducting any other pending criminal proceedings, postpone the surrender of the above-mentioned property until the

conclusion of such proceedings, or temporarily surrender that property on the condition that the Requesting Party undertakes to return it.

4. The surrender of such property shall not prejudice any legitimate right of the Requested Party or any third party to that property. Where these rights exist, the Requesting Party shall, at the request of the Requested Party, promptly return the surrendered property without change to the Requested Party as soon as possible after the conclusion of the proceedings.

ARTICLE 17

MUTUAL LEGAL ASSISTANCE

Each Party shall, to the extent permitted by its laws, afford the other the widest measure of mutual legal assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested.

ARTICLE 18

TRANSIT

1. To the extent permitted by its law, transit of a person to be extradited to one Party by a third state through the territory of the other Party shall be authorized upon request submitted through the channel provided for in Article 5 of this Treaty. Authorization for transit shall not be required when air transport is to be used and no landing is scheduled in the territory of the Party of transit.
2. If an unscheduled landing occurs in the territory of that Party, it may require the other Party to furnish a request for transit as provided in Paragraph 1 of this Article. That Party may, in so far as not contrary to its national law, hold the person in custody for a period of 72 (seventy two) hours while waiting the request of transit.

ARTICLE 19

NOTIFICATION OF RESULT

The Requesting Party shall inform the Requested Party promptly about the outcome of the criminal trial or the execution of sentence against the person extradited or information concerning the re-extradition of that person to a third country.

ARTICLE 20
EXPENSES

1. Expenses arising from the procedures for extradition in the Requested Party shall be borne by that Party. Expenses of transportation and the transit expenses in connection with the surrender or taking over of the extradited person shall be borne by the Requesting Party.
2. If it becomes apparent that the execution of the request requires expenses of an extraordinary nature, the Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the assistance can be provided.

ARTICLE 21
INTERNATIONAL OBLIGATIONS

This Treaty shall not affect the rights and obligation of the Parties concerning extradition pursuant to international conventions or other arrangements to which they are a party.

ARTICLE 22
SETTLEMENT OF DIFFERENCES

Any difference from the interpretation or application of this Treaty shall be settled by consultation between the Parties through the diplomatic channels.

ARTICLE 23
AMENDMENT

This Treaty may be amended at any time by mutual consent of the Parties in written form. Such an amendment shall enter into force by the same procedure as applicable for the entry into force of this Treaty.

ARTICLE 24
FINAL PROVISIONS

1. The Parties shall notify each other about the completion of their respective domestic requirements for the entry into force of this Treaty. This Treaty shall enter into force on the thirtieth day of the receipt of the later notification.
2. Either Party may terminate this Treaty by giving a notice in writing to the other Party through the diplomatic channels at any time. Termination shall take effect

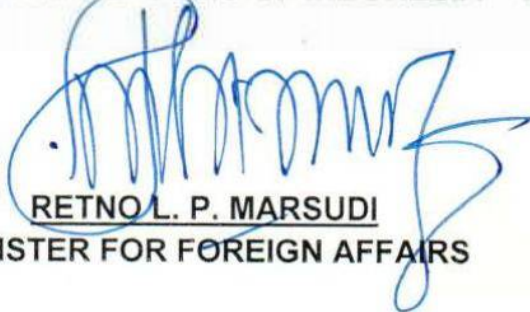
after 6 (six) months of the receipt of such notice. Termination of this Treaty shall not affect the extradition requests submitted prior to the termination.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

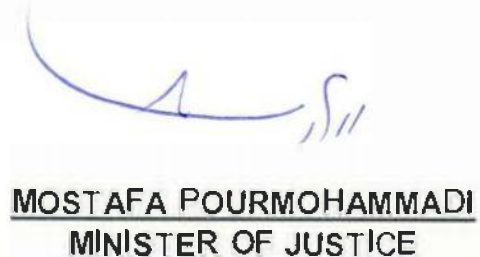
This Treaty, consisting of one preamble and 24 (twenty four) Articles, was made at Tehran on the 14th day of December in the year 2016, corresponding to the 24th day of Azar in the year 1395 in Iranian Calendar, in two originals, each in the Indonesian, Persian, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE REPUBLIC OF INDONESIA

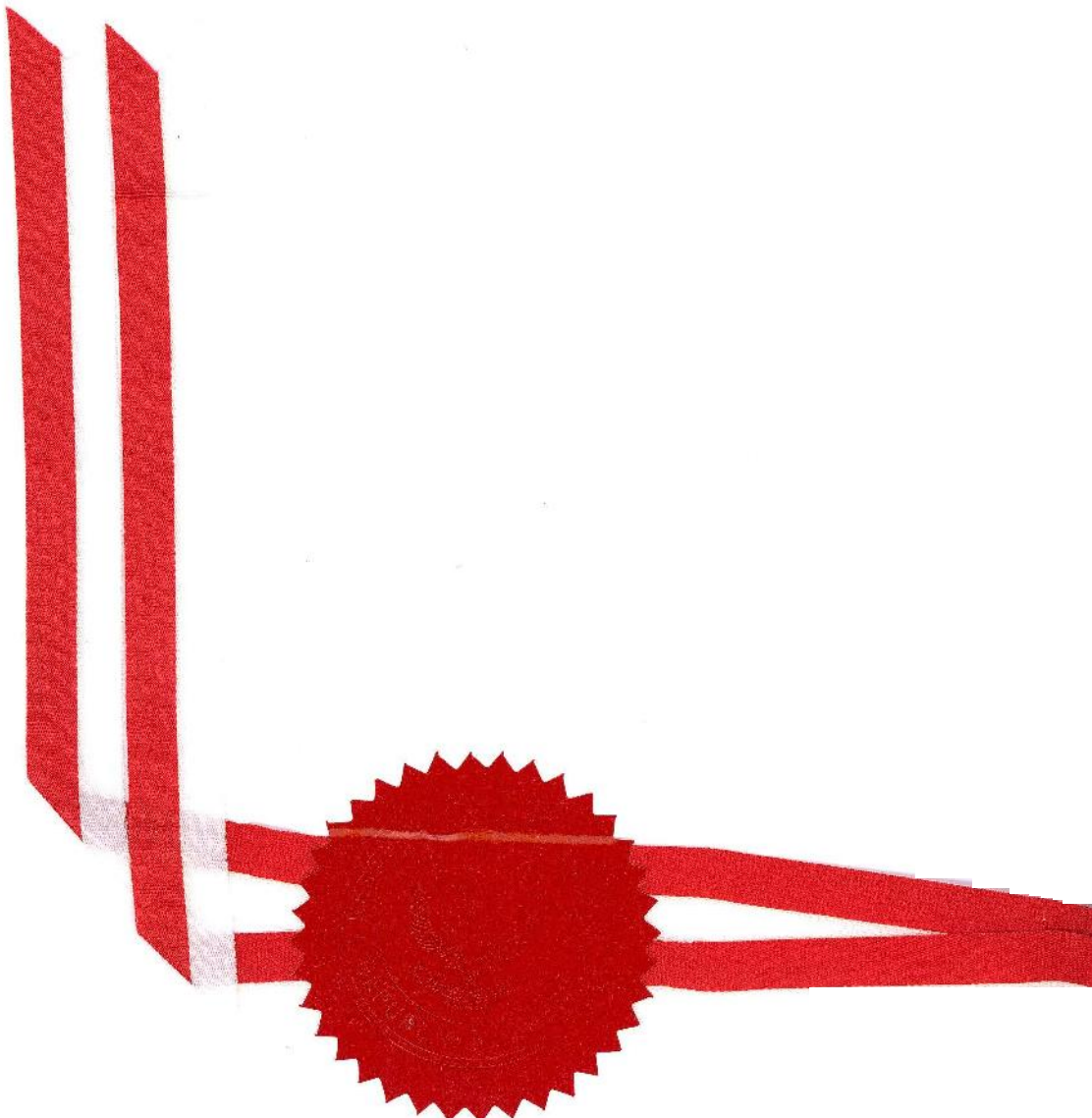
FOR THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN



RETNO L. P. MARSUDI
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS



MOSTAFA POURMOHAMMADI
MINISTER OF JUSTICE



Salinan naskah resmi
Certified true copy

Nomor _____ : 0063/CTC/03/2017/52
Number



Dr.iur. Damos Dumoli Agusman
NIP. 19630804 198803 1 001

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia
Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal _____ : 30 Maret 2017
Date